



**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN  
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI IV DPR-RI  
TANGGAL 18 JUNI 2008**

---

**Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat,  
Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat,  
Hadirin sekalian yang saya hormati,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Kerja.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya beserta segenap jajaran Departemen Pertanian mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, atas undangan rapat kerja khususnya membahas beberapa agenda yaitu berkaitan Skala Prioritas Pagu Indikatif APBN Tahun 2009, APBN-P Tahun 2008, tanggapan atas pertanyaan tertulis anggota Komisi IV, serta temuan hasil kunjungan kerja di beberapa daerah.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati.**

Sebelum kami menjelaskan mengenai skala prioritas Pagu Indikatif APBN Tahun 2009, perkenankan kami menyampaikan selamat kepada Sdr. Haji Zaenal Arifin Junaedi Ketua Komisi IV DPR-RI yang baru dan menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ishartanto atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan.

Tahun anggaran 2009 merupakan tahun anggaran yang ke V dari Kabinet Indonesia Bersatu. Oleh karenanya, program dan kegiatan tahun 2009 merupakan kelanjutan dari empat tahun sebelumnya dan merupakan satu kesatuan untuk mencapai target-target produksi komoditas utama dan strategis khususnya serta target indikator

makro yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 telah ditetapkan Tema RKP 2009 yaitu: *“peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan”*. Kemudian dari 37 prioritas pembangunan nasional dalam RKP tersebut, sebagai upaya penanganan masalah pembangunan ekonomi, sosial budaya, di pedesaan setidaknya terdapat lima fokus yang terkait erat dengan sektor pertanian yaitu: (1) peningkatan ketahanan pangan nasional, (2) peningkatan kualitas pertumbuhan pertanian, (3) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, (4) peningkatan ekonomi lokal, dan (5) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Lima fokus tersebut dijadikan sebagai arah utama kebijakan Departemen Pertanian Tahun 2009.

Didalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sasaran produksi lima komoditas pangan utama, yaitu sasaran produksi padi nasional tahun 2009 sebesar 63-64 juta ton dengan lokasi sentra di 16 provinsi, sasaran produksi jagung sebesar 18 juta ton dengan lokasi sentra di 7 provinsi, sasaran produksi kedelai sebesar 1,5 juta ton dengan lokasi sentra di 12 provinsi, sasaran produksi gula sebesar 3,3 juta ton tersebar di 7 provinsi, dan sasaran produksi daging sapi sebesar 399,5 ribu ton tersebar di 18 provinsi. Sedangkan sasaran produksi komoditas lainnya untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara rinci kami sajikan pada bahan terlampir.

Dengan sasaran produksi tersebut, diharapkan terjadi kontribusi terhadap: (1) pertumbuhan PDB pertanian (diluar kehutanan dan perikanan) sebesar 4,6-4,8 persen, (2) penyerapan tenaga kerja sebanyak 44,2 juta orang atau tambahan 0,8 juta orang dari target tahun 2008, (3) jumlah penduduk rawan pangan menurun 1 persen dibanding tahun 2008, (4) Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan berkisar antara 115-120, dan (5) surplus neraca perdagangan sebesar US \$ 16,22 milyar.

#### **Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya muliakan.**

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian seperti telah diuraikan di atas, berdasarkan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2009, Departemen Pertanian memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 8,39 triliun. Dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto Nominal Pertanian (tiga sub sektor) tahun 2007 yang mencapai Rp 415 triliun, alokasi anggaran adalah sebesar 2,0 persen. Alokasi dana tersebut terbagi atas anggaran rupiah murni (RM) belanja tidak mengikat sebesar Rp 6,48 triliun, belanja

mengikat sebesar Rp. 1,22 trilyun, PNBP sebesar Rp. 32,45 milyar dan PHLN sebesar Rp 0,64 trilyun.

Rancangan RAPBN Tahun 2009 diarahkan untuk membiayai 24 kegiatan utama, antara lain: (1) pembiayaan usaha pertanian bagi petani/kelompok tani/Gapoktan dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), penyediaan infrastruktur lahan dan air, serta untuk bantuan benih/bibit, penanganan pasca panen dan pemasaran, pengembangan kawasan, penanganan flu burung dan restrukturisasi perunggasan, PRIMATANI, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Kesehatan Hewan serta DPM-LUEP untuk penguatan stok pangan daerah; (2) pemberian insentif bagi petugas lapangan antara lain penyuluh PNS, tenaga harian lepas penyuluh, petugas pengamat hama, pengawas benih, inseminator, mantri tani, mantri statistik, medik/paramedik veteriner, dan tenaga lapangan lainnya, serta (3) kegiatan prioritas lainnya (ada 16 kegiatan), yang secara lebih rinci disajikan pada bahan yang telah kami sampaikan.

Pilihan kegiatan tersebut didasarkan pada pengalaman implementasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, yang mana kegiatan utama yang telah disebutkan menunjukkan pengaruh signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di perdesaan.

Kesepakatan pilihan kegiatan tersebut disepakati dari serangkaian kegiatan perencanaan pembangunan pertanian tahun 2009, antara lain: (1) musyawarah perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat, (2) pertemuan koordinasi perencanaan di Bappenas, serta (3) pertemuan sinkronisasi rancangan kegiatan di pusat dan daerah sesuai dengan pagu indikatif RAPBN tahun 2009.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati.**

Disamping pagu anggaran sebesar Rp. 8,38 trilliun tersebut, masih terdapat sumber pembiayaan dari pos belanja subsidi tahun 2009 yang berada di Departemen Keuangan yang besarnya diusulkan pemerintah sebesar Rp. 13,13 trilyun, dengan rincian untuk subsidi pupuk Rp. 10,74 trilyun, subsidi benih (PSO, BLBU dan CBN) sebesar Rp. 904,00 milyar, serta subsidi kredit/bunga KKPE, KUR dan KPEN-RP.

Sumber pendanaan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian sekitar Rp. 64,08 trilyun, antara lain bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Pertanian yang diharapkan dapat mencapai minimal sebesar Rp. 1,49 trilyun, pagu kredit KKPE sebesar Rp. 10,86 trilyun, Kredit Usaha Rakyat Rp. 14,3 trilyun, KUMK Rp. 3,10 trilyun dan KPEN-RP dengan pagu sebesar Rp. 34,33 trilyun. Khusus mengenai pemanfaatan dana dari DAK Tahun 2009, Departemen Pertanian mengusulkan prioritasnya pada kegiatan pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian antara lain berupa pengelolaan lahan, pengelolaan air dan perluasan areal pertanian.

Mengenai perkembangan pelaksanaan APBN-P Tahun 2008, dapat kami sampaikan bahwa RKA-KL/DIPA Revisi APBN-P tahun 2008 saat ini masih dalam proses pembahasan dengan DJA dan dalam waktu dekat sudah diterbitkan DIPA-nya. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan 2008 masih berada dalam kisaran jadwal yang telah ditetapkan.

#### **Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati**

Berkaitan dengan pelaksanaan PUAP, berkat dukungan dari semua pihak, maka kegiatan PUAP dapat berjalan sesuai rencana. Perkembangan realisasi kegiatan PUAP antara lain adalah: (1) telah diterbitkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta Peraturan mengenai penyaluran bantuan PUAP, (2) telah dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah, dan berdasarkan hasil sosialisasi banyak masukan untuk perbaikan nama desa dan kecamatan akibat kesalahan ketik, pemekaran, dan lainnya (3) telah dilakukan rekrutmen, pelatihan dan penempatan tenaga Penyelia Mitra Tani Tahap I, (4) telah dilakukan penempatan sebagian tenaga Penyuluh Pendamping, serta (5) beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk Tim Pembina maupun Tim Teknis-nya. Kegiatan yang sedang berjalan saat ini adalah (1) menyelesaikan seleksi 1.000 desa lokasi PUAP yang dibiayai APBN-P Tahun 2008, (2). Seleksi, penyiapan dan penumbuhan Gapoktan Sasaran, serta (3) pendampingan penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan. Diperkirakan pada Bulan Agustus-September 2008 dana bantuan PUAP sudah dapat disalurkan ke rekening Gapoktan.

Menanggapi pertanyaan Dewan tentang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), perlu kami sampaikan bahwa program ini termasuk dalam program subsidi benih yang anggarannya tidak masuk dalam APBN Departemen Pertanian. Namun demikian, mulai tahun 2008, Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan ini berada di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Untuk tahun 2008 besarnya subsidi benih (padi, kedelai, jagung) sebesar Rp. 689,70 milyar yang komponennya terdiri dari subsidi benih

Rp. 110,01 milyar; Cadangan Benih Nasional Rp. 190,04 milyar dan BLBU Rp. 389,64 milyar. Sebagai pelaksana penyaluran subsidi benih ini termasuk BLBU adalah PT Sang Hyang Seri dan PT. Pertani.

Realisasi pelaksanaan BLBU sampai saat ini adalah sekitar Rp. 66 milyar dengan rincian benih padi non hibrida 4.276 ton, benih padi hibrida 181 ton, benih kedelai 3.322 ton, dan benih jagung hibrida 786 ton. Angka-angka ini akan meningkat pesat di bulan-bulan mendatang sejalan dengan selesainya pelaksanaan seleksi CP/CL kegiatan SL-PTT oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan semua bantuan subsidi benih sudah dapat disalurkan kepada petani paling lambat bulan November 2008.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV dan hadirin yang saya muliakan.**

Berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2007 khususnya tentang kegiatan BLM yang berdasarkan evaluasi kami ternyata dapat secara lebih efektif meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani-peternak, dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami lanjutkan dan bahkan memberikan prioritas dalam APBN 2008 maupun RAPBN 2009.

Pada level nasional dampak kegiatan tersebut telah memberikan hasil yang melegakan. Produksi padi tahun 2007 mencapai 57,05 juta ton GKG, meningkat 2,59 juta ton GKG atau 4,77 persen dibanding produksi tahun 2006. Capaian peningkatan produksi padi tahun 2007 merupakan yang tertinggi sejak tahun 1996. Produksi jagung tahun 2007 mencapai 13,29 juta ton pipilan kering, naik 1,68 juta ton atau 14,44 persen dibandingkan produksi tahun 2006. Capaian produksi ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1988.

Sementara itu, data ARAM I (BPS) tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Data ARAM I untuk produksi padi mencapai 58,27 juta ton, jagung 13,88 juta ton dan kedelai 0,699 juta ton. Berdasarkan data ARAM I tersebut, kita optimis akan terdapat surplus beras diatas 1,3 juta ton. Kita berharap, dan dari perkembangan sampai saat ini menunjukkan data ARAM II 2008 akan semakin mendekati sasaran produksi 2008 yang telah kita sepakati.

Peningkatan produksi pangan tersebut diperoleh dari berbagai upaya terutama dari kegiatan pos belanja sosial/BLM, antara lain, bantuan benih cuma-cuma, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pengolah pupuk organik (APPO), pengembangan mekanisasi pra dan pasca panen, serta pelaksanaan sistem PHT.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati**

Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, telah diimplementasikan berbagai kegiatan unggulan yaitu Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) pada 354 desa di 180 kabupaten/kota; *Participatory Integrated Developmen in Rainfed Areas* (PIDRA) yang secara kumulatif sejak tahun 2001-2008 telah menjangkau sebanyak 42.292 KK petani miskin yang tergabung dalam 2.339 Kelompok Mandiri (KM) di 237 desa. Sementara itu, beberapa kegiatan pengelolaan lahan dan air seperti Rehabilitasi JITUT dan JIDES, Pengembangan Tata Air Mikro (TAM), Irigasi Air Tanah Dangkal, Pengelolaan Irigasi Partisipatif serta pembangunan Dam Parit, serta Optimasi Lahan dan Perluasan Areal, telah memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas.

Berkenaan dengan penyiapan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Pusat dan Daerah; dapat kami sampaikan sebagai berikut. Kami telah membentuk Tim dengan Kepmentan No. 194/Kpts/OT.160/3/2007 tanggal 12 Maret 2007. Dalam pelaksanaannya, dua PP yang direncanakan, yaitu PP mengenai Pembiayaan dan PP mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, diputuskan untuk digabung ke dalam satu PP, yaitu PP tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian. Dua Perpres telah disiapkan sesuai dengan rencana, yaitu Perpres tentang Wadah Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Perpres tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Adapun tujuh Permentan yang direncanakan terbit, dalam pelaksanaannya diputuskan untuk digabungkan menjadi lima Permentan, yaitu: (1). Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian; (2). Pedoman Standar, Akreditasi, Pola Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian; (3). Kebijakan Strategis, Mekanisme Kerja, Metode Penyuluhan Pertanian dan Materi Penyuluhan dalam Bentuk Teknologi Tertentu; (4). Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian; (5). Komisi Penyuluh Pertanian Nasional. Draft final PP telah disampaikan kepada Presiden RI, dua Perpres kepada MENPAN, sedangkan draft lima Permentan dan satu Kepmentan pada saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati**

Sehubungan dengan pelaksanaan SP-3 dan Program Kredit lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk pelaksanaan SP-3, total pembiayaan yang telah disalurkan oleh lima Bank Pelaksana per 30 April 2008 mencapai Rp. 421,6 trilyun dengan jumlah nasabah petani dan peternak yang terlayani sebanyak 6.445 orang. Realisasi penyaluran Pelaksanan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) per Desember 2007 (kumulatif 2001 – 2007) mencapai Rp. 5,036 trilyun atau 241 persen dari plafon sebesar Rp. 2,082 trilyun. Sedangkan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Maret 2008 sebesar Rp 1,87 Trilyun dengan jumlah nasabah UMKM yang dibiayai sebanyak 56.200 debitur.

Dalam hal pelaksanaan Program Penguatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Tim Pelaksana LM3 Pusat, telah menseleksi dan memverifikasi sebanyak 1.042 LM3 penerima bantuan penguatan modal usaha Agribisnis, dan 100 LM3 penerima bantuan yang berasal dari APBN-P. Jika tiap LM3 minimal bisa menjangkau 1 kelompok tani yang beranggotakan minimal 30 orang, maka kegiatan LM3 tahun 2007 telah menjangkau minimal 34.260 orang petani.

Untuk menghindari kelangkaan dan hambatan distribusi pupuk bersubsidi, Pemerintah Daerah telah mengusulkan kebutuhan pupuk di masing-masing wilayahnya yang secara nasional mencapai 5,8 juta ton Urea, 2,4 juta SP-36, 1,2 juta ton ZA dan 1,3 juta pupuk NPK. Namun dengan keterbatasan subsidi yang tersedia tahun 2008, alokasi pupuk bersubsidi hanya dapat dipenuhi sebesar 4,3 juta ton Urea, 800 ribu ton SP-36, 700 ribu ton ZA, 900 ribu ton NPK dan 345 ribu ton pupuk organik. Sebagian besar atau lebih dari 60 persen dari alokasi pupuk subsidi tersebut untuk petani tanaman pangan.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi selain oleh produsen pupuk holding juga dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani. Pola penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Holding pupuk menggunakan pola subsidi harga. Sedangkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui PT Sang Hyang Sri dan PT Pertani dilaksanakan dengan pola Bantuan Langsung Pupuk kepada petani yang meliputi jenis pupuk NPK, pupuk organik granul dan pupuk organik cair.

Upaya untuk mengatasi kelangkaan, penyelewengan dan harga pupuk antara lain dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Komisi Pengawasan

Pupuk dan Pestisida; melakukan ujicoba penyaluran dan pembelian pupuk bersubsidi melalui penggunaan kartu kendali (Smartcard) di enam propinsi dan enam kabupaten (OKU Timur, Purwakarta, Batang, Sleman, Badung dan Maros); menugaskan produsen pupuk untuk meningkatkan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya; menerapkan penggunaan format Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan mendorong petani membentuk lembaga berbadan hukum agar dapat melakukan akses langsung dengan produsen/distributor; meningkatkan pembinaan/sosialisasi efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui pengembangan penggunaan pupuk majemuk NPK dan pupuk organik, serta memfasilitasi penyediaan alat pembuat pupuk organik bagi kelompok tani agar dapat mengoptimalkan penggunaan pupuk organik *in situ* yang diproduksi oleh kelompok tani.

#### **Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati**

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya pengaruh anomali iklim, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta bencana alam, antisipasi yang dilakukan antara lain adalah melakukan monitoring Dampak Fenomena Iklim (DFI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di seluruh propinsi, mengirimkan informasi prakiraan iklim tentang mulainya awal musim (Musim Hujan dan Musim Kemarau) beserta sifat hujannya dari BMG, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan Departemen Pekerjaan Umum, serta menggerakkan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui kegiatan peramalan produksi untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan memberikan intervensi sesuai kebutuhan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan iklim untuk kegiatan budidaya tanaman melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI) dan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).

Untuk mengantisipasi dinamika harga komoditas pangan dan kesejahteraan petani sehubungan dengan kenaikan harga BBM dan kecenderungan negara-negara maju mengembangkan *bio-fuel*, Departemen Pertanian bersama pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari sumber produksi dalam negeri, serta mendorong pengembangan cadangan pangan daerah. Dalam jangka menengah/panjang, kenaikan harga-harga tersebut tentu merupakan kesempatan bagi petani, pelaku usaha pertanian lainnya serta kalangan

perbankan untuk lebih banyak lagi menanamkan modalnya pada bidang usaha pertanian ini.

Berkaitan dengan temuan hasil Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah, telah kami uraikan secara rinci dalam bahan lengkap.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV yang saya hormati**

Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, saya mohon agar Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menjelaskannya.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, saya mengucapkan terima kasih. *Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Menteri Pertanian RI,

**ANTON APRIYANTONO**